

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Calon apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga ketika harus terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker telah siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara profesional.
3. Calon apoteker harus belajar ilmu komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang rasional.
4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti cara penggunaan yang benar dari obat yang diperoleh dan dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
5. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan

tentang keluhan-keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan, di sinilah peran apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan informasi obat serta dapat memberikan pengobatan swamedikasi.

6. Apotek Libra disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.
7. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat

DAFTAR PUSTAKA

Depkes RI, 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/ MenKes/ SK/ VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotik, Jakarta.

Depkes RI, 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/ MenKes/ Per/ X/ 1993 tentang Obat Wajib Apotik, Jakarta.

Depkes RI, 1997, Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Jakarta.

Depkes RI, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/ Menkes/ Per/ X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Jakarta.

Depkes RI, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

Depkes RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.

Depkes RI, 2009, Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta.

Depkes RI, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.

Depkes RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.

Depkes RI, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.

Depkes RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.

Depkes RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta.

Hartini, Y.S, dan Sulasmono, 2006, Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek, Universitas Sanata Dharma,

Yogyakarta.Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/ VII/ 2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker. Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.

Seto, S. dan Yunita, N. 2008. Manajemen Farmasi. Airlangga University Press, Surabaya.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, Manajemen Farmasi ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.